

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya UU No. 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwadalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi merealisasikan sistem pemerintahan yang baik perlu adanya reformasi birokrasi. Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten, kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajemen dalam birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif.

Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja dilakukan untuk menanggapi TAP MPR No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan Instruksi presiden No 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, instruksi presiden No 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No49 tahun 2011 tentang pedoman umum fakta integritas dilingkungan kementrian/lembaga dan pemerintah daerah, serta beberapa peraturan lainnya. Menanggapi mandat tersebut maka

dikeluarkan Inpres No 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan Negara, UUNo.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan dan pembangunan nasional danUU No. 33 tahun2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demikratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2014) menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk menilai apakah program/kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Penilaian kinerja pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena pada dasarnya orientasi organisasi publik bukan untuk mencari laba, tetapi lebih mengutamakan terhadap pelayanan publik.

Hasil pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*), yang selanjutnya dianalisa untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna mencapai kinerja yang baik dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Dan dari hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan keberhasilan dari target yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah diantaranya adalah pemanfaatan teknologi informasi, *good governance* dan pengendalian intern. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer. Sistem informasi yang didukung teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi maka organisasi akan mengalami perubahan sistem manajemen, dari sistem tradisional ke sistem manajemen kontemporer.

Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien.

Irine Chintya (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Sistem informasi yang didukung Teknologi Informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif.

Menurut Bodnar dan Hopwood (2006) Sistem informasi dapat diartikan sebagai penggunaanteknologi komputer yang meliputi perangkat *Hardware* dan *software* yang telah dirancang untuk mengubah data menjadi suatu informasi yang berguna kepada pengguna informasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Keberhasilan pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang telah dirancang sangat dipengaruhi oleh faktor desain sistem yang

mencerminkan adanya pemisahan tanggung jawab fungsional yang tepat dan sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik.

Astuti Handaiyani Siregar dan I Ketut Suryanawa (2008) dalam penelitiannya menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individual pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Dan Irine Chintya (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa informasi teknologi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Solok. Namun hasil penelitian ini berlawanan dengan Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2011) yang menyatakan bahwa komponen pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah Kampar, Riau.

Good governance merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan kinerja instansi pemerintah. *Good governance* adalah pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hadori Yunus (2000:1) berpendapat bahwa unsur-unsur *good governance* adalah tuntutan keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi di segala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*) dan kewajaran (*fairness*). Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Para pejabat publik, unsur-unsur dalam masyarakat sipil dan dunia usaha sama-sama memiliki kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan pemerintah daerah demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat.

Prima Yuda (2012) dalam penelitiannya menyatakan pelaksanaan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Dan Nur Azlina (2014) juga menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan terhadap

kinerja pemerintah daerah kabupaten pelalawan. Hal ini juga didukung oleh Dedy (2009) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah kota Bandung. Namun Trisnaningsih (2007) menemukan bahwa *Good Governance* tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung melalui independensi auditor.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja suatu organisasi adalah pengendalian intern. Dengan melaksanakan *good governance*, yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi tentu akan lebih baik jika dibarengi dengan pengendalian intern yang efektif didalam suatu organisasi. Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan SPIP pada Pemerintah Daerah akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

Dengan adanya penerapan SPIP, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah serta keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik.

Irine Chintya (2010) dalam penelitiannya menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah di Kota Solok. Azwir Nasir dan Ranti Oktari (2011) menyatakan Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Kampar. Prima Yuda (2012) menyatakan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi pada Dinas

Daerah Kota Tasikmalaya. Dan Nur Azlina dan Ira Amelia (2014) juga berpendapat pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Pelalawan. Namun Andi Yusuf Wahyu (2009) menemukan bahwa Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Iktria Susanti (2014) tentang pengaruh *Good Governance*, Pemamfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Siak. perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada objeknya yaitu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Alasan peneliti mengambil objek di Kabupaten Mandailing Natal karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh teknologi informasi, *goodgovernance*, dan pengendalian intern bagi pemerintahan dalam mewujudkan kinerja dan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya.

Fenomena yang terjadi pada kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal pada saat ini belum diterapkan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yaitu: penerapan *good governance* dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suara-suara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah. Kondisi ini terjadi di Kabupaten Mandailing Natal.

Di era pemerintahan modern dewasa ini, fungsi pokok birokrasi dalam Negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara (Budi Setiono, 2002:72). Dalam konteks tersebut birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tugas pokok (Dwipayana 2003:65) yakni: fungsi pelayanan publik (publik services) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan dokumen, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan keamanan bagi penduduk. Kenyataan fungsi birokrasi pemerintah di daerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya.

Masyarakat pada umumnya mengidentifikasikan birokrasi sebagai proses berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya menimbulkan keluhan kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak efisien. Sikap mental yang arogan dan etos kerja rendah dikalangan birokrat sering menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini. Masalah pelayanan publik atau publik service di kabupaten mandailing natal untuk masa sekarang ini masih jadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komperhensif hal ini dibuktikan ketika timbul berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat kepada pejabat negara. Kurang transparan pengambil keputusan yang dilakukan pemerintah, control lembaga yang kurang berfungsi dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat di kantor Kabupaten Mandailing Natal kurang maksimal, masih terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum pejabat tertentu.

Melihat adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu dan fenomena pemerintah daerah saat ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali dengan judul “**Pengaruh Teknologi Informasi, Good Governance, dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Mandailing Natal)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pengaruh *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal?
4. Bagaimana pengaruh teknologi informasi, *good governance*, dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal.
2. Mengetahui pengaruh *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal.
3. Mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

4. Mengetahui pengaruh teknologi informasi, *good governance*, dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh teknologi informasi, *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Mandailing Natal.
2. Bagi akademisi diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran mengenai pengaruh teknologi informasi, *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah.
3. Bagi pemerintah daerah dapat menjadi pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

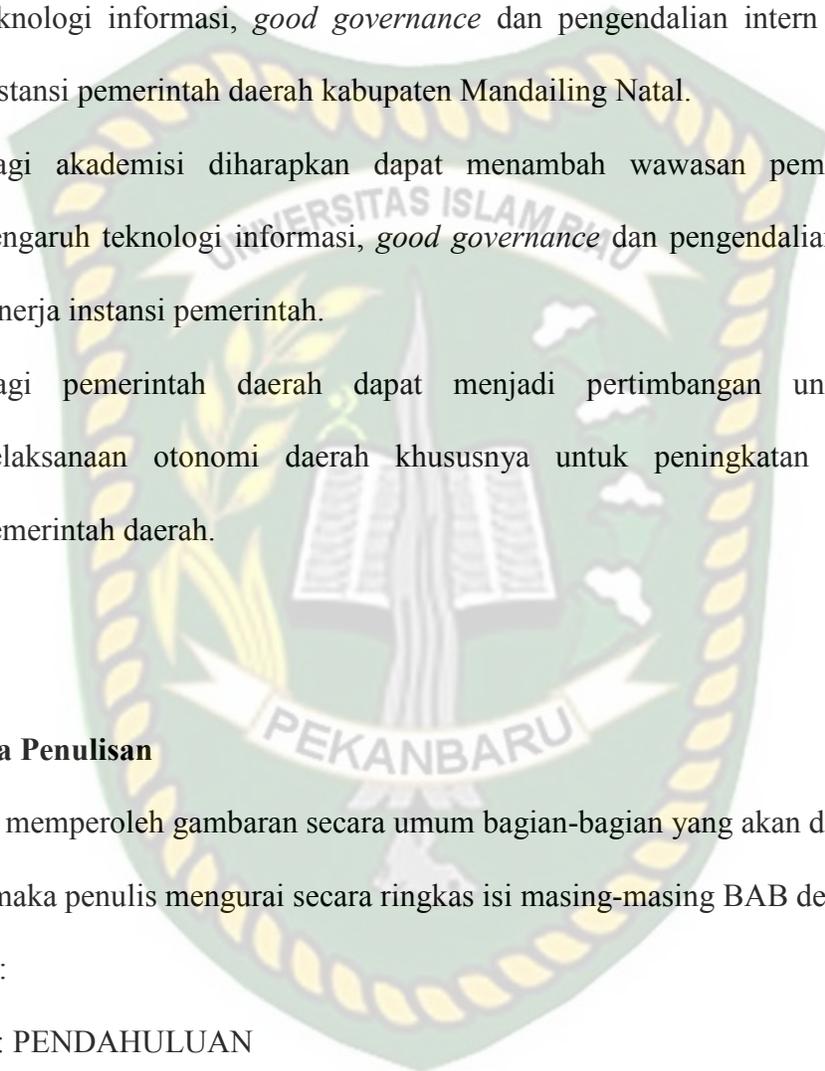
E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mengurai secara ringkas isi masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan menjelaskan latarbelakang, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS



Bab ini menjelaskan secara teoritis mengenai teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, juga acuan untuk melakukan penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode dan variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV :GAMBARAN UMUM

Bab ini memberikan gambaran umum tentang Kabupaten Mandailing Natal yang menjadi objek penelitian ini.

BAB V :HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya yang telah dilakukan, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian.

BAB VI :PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil dan saran yang diberikan sehubungan dengan hasil Penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau